

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* (STUDI KASUS PADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019-2021)

Indah Putri Nurafifah¹, Haliah², Nirwana³

¹Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, telp 08115003636, email: indahputrinurafifah@gmail.com

²Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, telp 08115003636, email: haliah@fe.unhas.ac.id

³Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, telp 08115003636, email: nirwanani@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06 October 2022

Received in revised form 7 October 2022

Accepted 10 October 2022

Available online 21 October 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire using a value for money approach from 2019 to 2021. Value for money is used to measure performance by looking at the ability of local governments to implement government control mechanisms. This study uses Value for money ratios consisting of economic, effectiveness, and efficiency indicators using quantitative descriptive analysis techniques that describe phenomena or characteristics in the 2019 and 2021 data periods. This research was carried out at the Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire using secondary data sources. Secondary data used in the form of documents, namely the results of the APBD and RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire on the Ministry of Finance DHPK data portal website: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. The results of the study illustrate that the performance of Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire has not met the concept of value for money because the economic ratio exceeds 100% in 2019 and 2021, which means that the realization of expenditure exceeds the budget. The level of efficiency exceeding 100% in 2019 means inefficient which means that the realization of expenditure exceeds the realization of income and less than 100% in 2019-2020 which means that it is not effective because the realization of income is below the revenue budget.

Keywords: performance, value for money, economical, efficient, effectiveness.

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pemerintah kabupaten Nabire menggunakan pendekatan value for money dari tahun 2019 hingga 2021. Value for money digunakan untuk mengukur kinerja dengan melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan mekanisme kontrol pemerintahan. Penelitian ini menggunakan rasio pada value-for-money yang terdiri dari indikator ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dalam data periode 2019, 2020 dan 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen, yaitu hasil APBD dan

RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada website portal data DHPK Kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Nabire belum memenuhi konsep value for money karena rasio ekonomi melebihi 100% pada tahun 2019 dan 2021 yang artinya realisasi belanja melebihi anggaran belanja. Tingkat efisiensi melebihi 100% di tahun 2019 artinya tidak efisien yang artinya realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan dan kurang dari 100% pada 2019-2020 yang artinya tidak efektif karena realisasi pendapatan di bawah anggaran pendapatan.

Kata Kunci: kinerja, *value for money*, ekonomis, efisien, efektivitas.

1. PENDAHULUAN

Sebagai organisasi sektor publik, misi utama pemerintah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Praktik pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya. Tentunya setiap instansi mendapatkan dana dari APBD untuk mencapai tujuannya. Nantinya, anggaran juga harus mengakomodir pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Menurut PP RI tentang PKD No.12 tahun 2019, keuangan daerah harus dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tentang keadilan, kesopanan, dan rasa hormat yang diterapkan dalam sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran.

Daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah menunjukkan beberapa indikator, seperti kemampuan keuangan daerah dan pemanfaatan PAD. Pengukuran kinerja adalah alat manajemen berorientasi akuntabilitas yang digunakan untuk meningkatkan taraf dalam *decision making* dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tindakan pemerintah. Hasil pengukuran tersebut dapat menunjukkan tingkat implementasi visi dan misi pemerintah saat ini. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah sudah ekonomis, efektif dan efisien.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik adalah dengan menggunakan pendekatan value for money. Value for Money adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Pengadaan dan alokasi sumber daya yang hemat, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil, dan mencapai tujuan dengan efektif. Pendekatan value for money untuk pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan mekanisme manajemen pemerintahannya yang mengandalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada mereka yang mereka layani. Birokrat dapat lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai organisasi sektor publik, melaporkan hasil kinerja dan mengukur kinerja organisasi sesuai dengan pedoman kinerja organisasi pemerintah. Menurut hasil survei sebelumnya, dari tahun 2016 hingga 2019, pemerintah daerah prefektur OKU melaksanakan seluruh programnya secara ekonomis dan efisien, sedangkan hasil tingkat efektivitas tahun 2015-2018 dinilai tidak efektif karena rasionya kurang dari 100% (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021). Studi lain menunjukkan bahwa tahun 2014-2018, pemerintah provinsi Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan secara ekonomis dan cukup efektif, tetapi tingkat efisiensinya masuk kategori tidak efisien di tahun 2015, karena rasionya lebih dari 100% (Rahmawati & Handayani, 2019). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengukuran kinerja sangat penting dalam menentukan apakah kinerja pemerintah daerah sudah efisien, efisien dan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah Bagaimana kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menggunakan pendekatan *Value For Money*?. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun 2019 hingga tahun 2021. Alat analisa yang digunakan sebagai alat asah adalah *value for money* (VFM) yang terdiri dari keseluruhan elemen, dimana elemen tersebut terdiri dari ekonomi, efisiensi dan efektivitas seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selain untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau pemahaman terhadap kinerja pemerintahan dan konsep dari *value for money* (VFM) itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah capaian kerja seseorang atau organisasi dalam jangka waktu tertentu sesuai wewenang dan tanggung jawabnya sebagai bentuk pencapaian tujuan yang valid (Djenni, 2021). Ukuran kinerja adalah cara menilai kemajuan pekerjaan seseorang terhadap tujuan dan target yang diberikan, termasuk informasi tentang

efisiensi, konsumsi sumber daya dalam produksi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan tujuan, dan efektivitas sarana untuk mencapai tujuan (Solihin, 2019). Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah proses pengukuran keberhasilan sektor publik dalam mengimplementasikan tujuan yang diberikan.

Tujuan pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (*top-down* dan *bottom-up*), mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang, melacak kemajuan dalam mencapai strategi, dan untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan *middle and lower manager* serta memotivasi untuk mencapai keselarasan tujuan serta sebagai alat pendekatan individu untuk mencapai kepuasan dan kemampuan kolektif berdasarkan pertimbangan yang logis (Permana & Riharjo, 2017).

2.2. Value For Money

Value for money yakni konsep untuk mengukur efisiensi, ekonomis dan juga efektivitas program, kegiatan, dan kinerja organisasi. Ekonomi mengacu pada bagaimana organisasi sektor publik meminimalkan sumber daya input yang digunakan melalui penghindaran pengeluaran yang tidak produktif dan boros, efisiensi dalam hal pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu, serta efektifitas dalam mencapai hasil program dengan tujuan yang sah (Wuwungan, et al. , 2019). Indikator pengukuran kinerja pada prinsip value for money terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Ekonomis

Ekonomis adalah ukuran relatif. Penerimaan kualitas dan kuantitas input tertentu dengan harga terendah di sebut ekonomis [1]. Pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spending less*) merupakan implementasi yang ekonomis (Basri, 2018).

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Ketika biaya meningkat, keuntungan harus meningkat lebih banyak lagi. Pengukuran dengan indikator ekonomis memerlukan data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja. Rumus untuk rasio ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Gambar 1. Rumus Rasio Ekonomis

Berikut ini adalah kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio ekonomis kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya ekonomis;
- Jika rasio ekonomis sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya ekonomis berimbang atau cukup ekonomis;
- Jika rasio ekonomis lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

b. Efisiensi

Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Tingkat efisiensi mengukur tingkat input sektor publik relatif terhadap tingkat output sektor publik. Efisiensi diukur dengan membandingkan sumber daya yang diproduksi dan digunakan (N.P. Solong, et al, 2022). Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan. Efisiensi berkaitan dengan pencapaian output yang maksimal untuk input yang diberikan (Meitri, 2022). Rumus efisiensinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Gambar 2. Rumus Rasio Efisiensi

Berikut ini adalah kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio efisiensi kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya efisien;
- Jika rasio efisiensi sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya efisiensi berimbang atau cukup efisien;
- Jika rasio efisiensi lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efisien.

c. Efektivitas

Tingkat efektivitas adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu organisasi atau lembaga dalam menggunakan sumber dayanya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. Efektivitas adalah hubungan output dan maksud yang dituju dengan mengukur seberapa baik kebijakan, prosedur dan tingkat output dalam memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan (P.A. Erawan, et al, 2018). Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efektif jika program atau kegiatan mencapai tujuan dan tujuan akhir dari kebijakan. Rumus rasio efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Gambar 3. Rumus Rasio Efektivitas

Berikut ini adalah kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan:

- Jika rasio efektivitas kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya tidak efektif;
- Jika rasio efektivitas sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya efektif berimbang atau cukup efektif;
- Jika rasio efektivitas lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data selama kurun waktu 2019, 2020 dan 2021 dengan menggunakan pendekatan metode value for money yang terdiri dari analisis Rasio Rasio efektivitas, Rasio Ekonomis dan Rasio efisiensi. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu jumlah hasil dari APBD dan RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire di situs Portal Data DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Tingkat Ekonomis

Hasil yang diperoleh dari laporan APBD Kabupaten Nabire tahun 2019-2021 atas data anggaran belanja dan hasil yang diperoleh dari RAPBD Kabupaten Nabire atas data realisasi belanja tahun 2019-2021 telah disimpulkan oleh peneliti untuk menghitung rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja (Dalam Miliaran Rupiah)		Anggaran Belanja (Dalam Miliaran Rupiah)		Rasio Ekonomis (%)	Keterangan
2019	Rp	1.416,13	Rp	1.222,52	115,84	Tidak Ekonomis
2020	Rp	1.099,25	Rp	1.207,79	91,01	Ekonomis
2021	Rp	1.145,38	Rp	1.094,39	104,66	Tidak Ekonomis

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk tahun 2019 sebesar 115,84% dan dikategorikan tidak ekonomis. Pada tahun 2020, hasil perhitungan ekonomis mengalami penurunan menjadi 91,01%. Walaupun mengalami penurunan, berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Nabire masuk dalam kategori ekonomis. Sedangkan pada tahun 2021, hasil perhitungan rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 104,66% (kategori tidak ekonomis).

Suatu kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan ekonomis apabila dapat melaksanakan pembelanjaan secara ekonomis dan menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Dengan asumsi jika realisasi belanja untuk tiap pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan pemerintah daerah lebih besar dari pada anggaran yang ditetapkan maka rasio ekonomis akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire adalah kurang baik karena pada tahun 2019 dan 2021 belum memenuhi kategori ekonomis yaitu penghematan anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. Persentase ekonomis diatas 100% berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah mengeluarkan dana lebih dari anggaran yang ditetapkan.

4.2. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Tingkat Efisiensi

Hasil yang diperoleh dari RAPBD Kabupaten Nabire atas data realisasi belanja dan realisasi pendapatan tahun 2019-2021 telah disimpulkan oleh peneliti untuk menghitung rasio efisien adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja (Dalam Miliaran Rupiah)		Realisasi Pendapatan (Dalam Miliaran Rupiah)		Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2019	Rp	1.416,13	Rp	1.343,32	105,42	Tidak Efisien
2020	Rp	1.099,25	Rp	1.159,19	94,83	Efisien
2021	Rp	1.145,38	Rp	1.248,54	91,74	Efisien

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2022

Pada tahun 2019, berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan maka rasio Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dikategorikan tidak efisien sebesar 105,42%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, perhitungan rasio efisiensi pada kegiatan yang dilakukan adalah masing-masing sebesar 94,83% dan 91,74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut dikategorikan efisien karena nilai rasio efisiensi tidak lebih dari 100%.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal untuk input yang diberikan. Efisiensi menggambarkan perbandingan pengeluaran biaya untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 100% atau semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik. Jika dilihat dari hasil olahan data menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat melaksanakan kerjanya secara efisien di tahun 2020 dan 2021, dapat di lihat dari hasil olahan data memperlihatkan rata-rata nilai rasio keuangan 90%.

4.3. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Tingkat Efektivitas

Hasil yang diperoleh dari laporan APBD Kabupaten Nabire tahun 2019-2021 atas data anggaran pendapatan dan hasil yang diperoleh dari RAPBD Kabupaten Nabire atas data realisasi anggaran tahun 2019-2021 telah disimpulkan oleh peneliti untuk menghitung rasio efektivitas adalah:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Dalam Miliaran Rupiah)		Anggaran Pendapatan (Dalam Miliaran Rupiah)		Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2019	Rp	1.343,32	Rp	1.365,02	98,41	Tidak Efektif
2020	Rp	1.159,19	Rp	1.290,29	89,84	Tidak Efektif
2021	Rp	1.248,54	Rp	1.201,39	103,92	Efektif

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2022

Rasio efektivitas pada 2019-2020 masing-masing adalah 98,41% dan 89,84%. Pengukuran kinerja yang diukur berdasarkan tingkat efektivitas di tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kategori tidak efektif, karena realisasi pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Artinya tingkat pencapaian hasil program terhadap tujuan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahun 2021 tergolong efektif (lebih dari 100%) dikarenakan hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 103,92%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan sudah berjalan baik.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan secara efektif. Yang terpenting, efektivitas tidak menyatakan berapa biaya yang harus di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah kegiatan telah sesuai dengan tujuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum sesuai prinsip *value for money* sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Ditinjau dari rasio ekonomis

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun 2020 sudah ekonomis. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 dikategorikan tidak ekonomis dikarenakan realisasi belanja melebihi anggaran belanja.

b. Ditinjau dari rasio efisiensi

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun 2019 masuk dalam kategori tidak efisien dikarenakan realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan yang artinya telah terjadi kerugian atau defisit. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 dikategorikan efisien karena rasionya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan dana yang minimum dalam mencapai hasil yang maksimal.

c. Ditinjau dari rasio efektivitas

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun 2019-2020 dikategorikan tidak efektif. Hal ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan belum terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2021 dikategorikan efektif karena anggaran pendapatan tidak lebih daripada realisasi pendapatan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire

Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya mampu melakukan penghematan anggaran dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan agar kegiatan dapat tercapai dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau defisit. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga harus lebih memperhatikan perencanaan dan juga pengendalian realisasi anggaran pendapatan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara ataupun penyebaran kuesioner kepada masyarakat terkait dampak yang dirasakan atas kinerja pemerintah daerah terkait dengan prinsip *value for money* untuk mengetahui pencapaian yang telah dilaksanakan pemerintah daerah sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jurusan Akuntansi FE UR.
- Djenni, S. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019. *Journal of Accounting Science and Technology*, 101.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: ANDI.
- Meitri, I. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. In *S.E. Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- N.P. Solong, et al. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Satuan Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode Tahun 2019-2021. *AKASYAH*, 2(1), 225.
- P.A. Erawan, et al. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(3), 189.
- Permana, D., & Riharjo, I. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(5).
- Rahmawati, I., & Handayani, N. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Solihin, D. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik TEDC Bandung. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(2), 103.
- Wuwungan, et al. . (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Yulitiawati, & Rusmidarti. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *JASE*.